

## **BAB II**

### **HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN AMERIKA SERIKAT**

#### **A. SEJARAH HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN AMERIKA SERIKAT**

Aliansi Arab Saudi – AS bermula pada tahun 1943. Pada saat itu putra mahkota Pangeran Faishal dan Pangeran Khalid mengunjungi Gedung Putih atas undangan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Kedua pangeran muda itu setuju menerima bantuan keamanan dari Amerika sebagai imbalan atas pilihan Saudi untuk terus memberi akses kepada perusahaan-perusahaan minyak Amerika di negara kerajaan tersebut. Kesepakatan itu akhirnya diresmikan pada tanggal 14 Februari 1945 antara Raja Ibnu Saud yang bertemu secara langsung dengan F.D. Roosevelt di atas kapal USS Quincy di Terusan Suez. Raja Saudi dan Presiden Amerika itu dengan cepat menjadi teman akrab, meskipun ada perbedaan pandangan cukup tajam terutama mengenai masa depan Palestina.

Enam dasawarsa selanjutnya, relasi Arab Saudi – Amerika sempat mengalami gelombang pasang surut, tetapi kemudian kedua negara tersebut kembali merapat dan menjalin hubungan yang lebih stabil. Pada tahun 1973, Raja Faishal mengembargo minyak kepada Amerika karena Presiden Richard Nixon dianggap mendukung Israel dalam perang Yom Kippur yang terjadi di bulan Oktober, namun akhirnya Arab Saudi dan AS bekerja sama mendorong proses perdamaian Arab-Israel. Di era 1980an, Khalid adalah partner Jimmy Carter dalam menyikapi invasi superpower Uni Soviet di Afghanistan. Sementara, Raja Fahd berpaling kepada Presiden George Bush untuk melawan ancaman Saddam Hussein dalam Perang Teluk I, serta membebaskan Kuwait. Tahun 1980an dan 1990an memperlihatkan terjalannya hubungan

kerjasama antara kedua negara dalam level yang belum pernah terjadi sebelumnya (Muslim, 2016, hal. 1).

Hubungan kembali renggang pada tahun 2000 ketika Presiden Bill Clinton gagal membawa Suriah dan Israel ke meja perundingan damai di Sheperdtown, dan juga gagal menengahi proses perdamaian antara Palestina dan Israel di Camp David. Kemudian Putra Mahkota Abdullah menganggap bahwa Bill Clinton telah gagal dalam menekan Israel supaya bersedia memberikan konsesi wilayah. Dalam pandangan para elit Saudi, seharusnya kesepakatan Suriah bisa terwujud pada tahun 2000 sehingga mendorong Damaskus mengambil jarak dengan Iran dan mengisolasi Syiah Hizbullah, sehingga pada akhirnya akan memberi jalan bagi sebuah kesepakatan mengenai Palestina. Pada saat itu, secara de facto Abdullah adalah Raja karena kesehatan Fahd yang terus memburuk. Abdullah kemudian sangat kecewa karena pada tahun 2001 George W. Bush mendukung Ariel Sharon saat terjadi perlawanan rakyat Palestina dalam Intifadah jilid II. Abdullah memarahi Menteri Luar Negeri AS saat itu, Colin Powell saat keduanya bertemu di Paris, dan menuduh Bush terlibat dalam berbagai kejahatan perang. Abdullah juga menolak bertemu dengan Bush atau berkunjung ke Washington meskipun atas permohonan kedua Bush (Josbus senior dan junior). Abdullah sedikit merasa tenang ketika George W. Bush secara terbuka menyerukan pembentukan negara Palestina. Hanya saja, di belakang layar para elit Saudi meragukan komitmen Bush tersebut.

Pasca 11/9 hubungan Saudi - AS kembali memburuk. Orang-orang Amerika bertanya mengapa 15 warga negara Arab Saudi menyerang Amerika, dan mengapa Usamah Bin Ladin membenci Amerika. Ideologi al-Qaidah dianggap berakar dari pemahaman teologi Wahabi Saudi. Arab Saudi menyangkal segala tuduhan yang mengaitkan negara kerajaan itu dengan al-Qaidah hingga akhirnya pada tahun 2003 kerajaan klan Saudi itu

mendapat serangan langsung dari organisasi al-Qaidah. Sejak serangan itulah, Riyadh mulai mengambil langkah konkrit untuk menindak al-Qaidah (Muslim, 2016, hal. 1).

Pada 18 April 2017, Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis melakukan kunjungan dua hari ke ibukota Saudi sebagai bagian dari tur regional selama seminggu. Pada konferensi pers, mantan komandan senior Amerika itu berkata bahwa kerajaan Saudi merupakan mitra kontraterorisme terbaik Amerika Serikat.

Kata-kata hangat Mattis membutuhkan penjelasan karena hubungan Amerika Serikat-Saudi telah mengalami penurunan selama lebih dari satu dekade. Secara historis, Amerika Serikat telah menganggap Arab Saudi sebagai sekutu dekat, meskipun terdapat perbedaan besar dalam nilai antara kedua negara. Tapi hubungan itu dirusak oleh serangan 9/11, yang dilakukan oleh kelompok yang menganut paham Salafi yang sama dengan Arab Saudi. Keputusan yang dibuat oleh administrasi Presiden George W. Bush pada tahun 2003 untuk melakukan perubahan rezim di Irak, yang memberdayakan pasukan Syiah pro-Iran di negara tersebut menyebabkan hubungan semakin memburuk antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Perpecahan itu diperdalam oleh keputusan pemerintahan Presiden Barack Obama untuk menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran pada 2015. Kesepakatan itu memberi Amerika Serikat sekutu kuat dalam perang melawan negara Islam, tetapi telah memberi kekuatan kepada Iran disaat Arab Saudi melemah (Bokhari, 2017, hal. 1).

Tren terbaru ini sangat kontras dengan hubungan kedua negara sejak 1945 yang mana terjadi pertemuan antara pendiri pemerintah Saudi modern, Raja Abdulaziz bin Abdulrahman al-Saud, dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menaiki USS Quincy di Great Bitter Lakedi Mesir. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mengambil alih posisi Britania Raya sebagai pelindung di Timur Tengah. Inggris sudah memiliki

hubungan yang sangat dekat dengan Raja Abdulaziz selama tiga dekade pertama abad ke-20. Saudi mengandalkan Inggris sebagai penjamin keamanan mereka, terutama pada saat Saudi dapat memperoleh keuntungan dari ekspor minyak mentah yang ditemukan pada tahun 1938. Wajar bagi orang Saudi untuk memeluk Amerika ketika Amerika Serikat muncul sebagai pemimpin dunia Barat (Bokhari, 2017, hal. 2).

Dari sudut pandang Amerika Serikat, Uni Soviet telah berubah dari sekutu dalam Perang Dunia II menjadi Musuh terbesar Amerika. Washington mengejar strategi penahanan terhadap Soviet. Strategi ini membutuhkan sekutu, terutama di Timur Tengah tempat Kremlin juga mencari keselarasan dengan pasukan Arab sayap kiri yang nasibnya meningkat pada saat itu. Arab Saudi, dengan monarki keagamaan ultrakonserfatifnya, adalah sekutu alamiah dalam upaya Amerika untuk melawan pro Rezim sekuler Soviet yang muncul di banyak negara Arab termasuk Mesir, Suriah, Irak, Libya, Aljazair dan Yaman Selatan, serta aktor non-negara Arab terbesar pada saat itu, Organisasi Pembebasan Palestina. Akibatnya, rezim Saudi - di samping monarki Arab lainnya (terutama di Teluk Persia) serta Turki dan Iran - menjadi sekutu dekat kamp Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Ironisnya, dalam upaya melawan Uni Soviet dan sekutunya yang sekuler, Amerika Serikat memberdayakan para aktor Islamis. Hubungan Amerika Serikat-Saudi semakin diperkuat ketika Amerika menggulingkan anti-Islamis Syiah monarki di Iran pada revolusi 1979. Tapi tidak ada tempat di mana pun aliansi Amerika-Saudi melawan komunisme lebih signifikan daripada di Afghanistan di 1980-an (Bokhari, 2017, hal. 3).

Saudi menghabiskan miliaran petrodolar untuk membantu Amerika Serikat selama Perang Dingin. Sebagai gantinya, Amerika Serikat tetap menjadi penjamin utama stabilitas kerajaan Arab Saudi. Pada masa itu, Amerika Serikat mengabaikan sifat rezim Saudi yang

tidak demokratis dan Salafi yang sangat berideologi keras. Amerika Serikat mengerahkan 500.000 pasukan untuk melindungi Saudi setelah Irak menyerang dan mencaplok Kuwait pada tahun 1990, yang mengarah ke Perang Teluk pada tahun 1991. Tahun itu adalah titik balik utama. Saat Uni Soviet meledak dan mengakhiri Perang Dingin. Sekitar pada saat yang sama, gerakan jihadis global dalam bentuk al-Qaida muncul sebagai ancaman kepentingan global Amerika. Jihadisme transnasional adalah bentuk alami dari Salafisme, yang berakar di Arab Saudi. Jihadisme transnasional selanjutnya diberdayakan oleh kebutuhan Amerika Serikat untuk milisi Islam radikal untuk melawan Soviet dan sekutu komunis mereka. Karena itu, Amerika Serikat mengabaikan hubungan organik antara rezim Saudi dan para jihadis selama satu dekade lagi. Al-Qaida merancang serangan 9/11 untuk memutuskan aliansi Amerika Serikat-Saudi. Namun Gerakan jihadis tersebut tidak berhasil dalam tujuan ini, tetapi serangan itu melemahkan ikatan Amerika Serikat-Saudi. Satu perbedaan utama antara kepentingan Amerika Serikat dan Saudi yang muncul secara bertahap menjadi semakin jelas untuk Amerika yang ingin secara bersamaan memerangi jihadis dan mempertahankan hubungan dengan Arab Saudi itu tidak mungkin untuk dilakukan. Para jihadis bukanlah sekutu rezim Saudi yang sangat ingin menggulingkannya. Namun, mengingat tumpang tindih dalam identitas dan ideologi jihadis dan kerajaan Saudi, Riyadh tidak dapat melawan gerakan transnasional. Saudi tidak bisa mengubah sifat kaum salafi, dan memerangi jihadisme juga dapat melemahkan rezim Saudi. Karena Washington memang dibutuhkan menjadi seorang mitra dalam pertarungan ini, ia masuk ke dalam hubungan yang rumit tetapi kooperatif dengan Riyadh.

2011 adalah tahun dimana ada kejadian penting lain. Amerika Serikat menarik pasukannya keluar dari Irak, meninggalkan Irak yang masih masuk di orbit Iran. Pada saat itu, Arab Spring sudah berumur satu tahun

dan sudah mulai melubangi dunia Arab. Satu-satunya negara Arab yang tidak terpengaruh oleh Arab Spring adalah Arab Saudi.

Saudi, telah dipaksa untuk menangani kekacauan regional yang lebih buruk adalah anjloknya harga minyak pada tahun 2014, yang sangat melukai Saudi. Meskipun kepentingan mereka telah menyimpang, Washington masih membutuhkan Riyadh karena Amerika Serikat ingin menjaga keseimbangan strategi kekuasaan. Amerika Serikat tidak ingin melihat Iran mengambil keuntungan dari kekacauan di dunia Arab dan mengumpulkan pengaruh yang tidak proporsional. Oleh karena itu, akhirnya Amerika terpaksa juga bersandar pada Turki untuk mengambil peran regional yang lebih menonjol, terutama dalam perang melawan negara Islam. Turki adalah pemimpin alami kawasan ini, tetapi karena masalah domestiknya, Turki tidak dalam posisi untuk campur tangan saat ini. Ini berarti bahwa Amerika masih membutuhkan Saudi meskipun Riyadh tidak dapat memastikannya untuk tidak bekerja sama dengan negara Islam lainnya yaitu Afghanistan. Paling tidak, Amerika Serikat tidak ingin melihat Saudi melemah. Jika ini terjadi akan berdampak kepada terciptanya lebih banyak ruang untuk tidak hanya Iran tetapi juga ISIS. Ketakutan inilah yang sekarang menjadi landasannya kemitraan Amerika Serikat-Saudi (Bokhari, 2017, hal. 4).

Karena pada dasarnya tujuan kebijakan luar negeri Saudi adalah untuk menjaga keamanannya dan posisi terpentingnya di Semenanjung Arab, membela kepentingan umum Arab dan Islam, mempromosikan solidaritas di antara pemerintah Islam, dan menjaga hubungan kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak dan negara-negara penghasil minyak utama lainnya. Oleh karena itu, Arab Saudi menggunakan "minyak untuk keamanan" karena bagi Arab Saudi Amerika Serikat memegang peranan penting dalam menjaga posisi Arab Saudi di kawasan Timur Tengah

salah satunya yaitu dengan cara mengekspor kebutuhan militer Arab Saudi (Pike, 2017)

## **B. ERA OBAMA**

Setelah menjabat sebagai Presiden AS pasca memenangi pemilu 2009, Riyadh menjadi tujuan pertama kunjungan Obama ke negara-negara Timur Tengah. Pertemuan dengan Raja Abdullah kurang memuaskan, dan Obama berjanji akan menyelesaikan mengenai isu Palestina. Tetapi kemudian elit Saudi meyakini bahwa Obama menyerah kepada Benjamin Netanyahu, maka Arab Saudi merasa kecewa lagi.

Revolusi Arab Spring membuat hubungan Arab Saudi dengan AS semakin memburuk. Raja Abdullah menginginkan Obama mendukung penuh diktator Mesir Husni Mubarak, dan tidak meninggalkan sekutu lamanya tersebut. Namun ternyata, pasca lengsernya Husni Mubarak, Barat melihat demokrasi Sunni di Mesir yang lebih buruk daripada demokrasi di kalangan Syiah di Iraq.

Perubahan rezim otoriter Husni Mubarak ke arah “demokrasi” Mesir di bawah Presiden Muhammad Mursi merupakan sebuah tantangan bagi esensi dan eksistensi monarkhi di negara-negara kawasan Teluk. Bahkan lebih sulit lagi bagi Arab Saudi untuk menerima gagasan mengenai reformasi politik dan demokrasi di Bahrain di mana monarkhi Sunni merasa terancam oleh mayoritas Syiah di sebuah negara kaya minyak yang berada di seberang pantai wilayah provinsi bagian timur kerajaan Raja Fahd itu. Dinamika politik di Bahrain menjadikan sumber keuangan Kerajaan Saudi dipertaruhkan. Washington secara terbuka bersimpati dengan reformasi di Bahrain, maka Riyadh dan Abu Dhabi mengirim pasukan dan kendaraan lapis baja ke sana, dan hingga sekarang masih ada di sana. Akhirnya upaya kontra revolusi oleh Saudi dan UEA telah menang, paling tidak untuk saat sekarang.

Berikutnya adalah Mesir. Riyadh tahu betul siapa Jenderal Abdul Fattah al-Sissi yang telah meng kudeta pemerintahan Mursi yang sah, karena al-Sissi adalah mantan pejabat atase militer Mesir di Arab Saudi. Pangeran Bandar, mantan duta besar Saudi untuk AS yang kemudian pada tahun 2013 menjadi Kepala BIN Arab Saudi mendukung al-Sissi sebagai “Mubarak” baru. Ketika al-Sissi merebut kekuasaan, tidak lebih dari 5 menit kemudian Raja Abdullah mengakui kudeta militer di Mesir itu sah. Sejak itu, Arab Saudi memberikan dukungan dana kepada rezim diktator al-Sissi (Muslim, 2016, hal. 1).

### **C. IRISAN KEPENTINGAN**

Di tengah semua perbedaan itu, hubungan Arab Saudi dan Amerika tidak terputus sama sekali. Kedua negara masih saling membutuhkan. Salman dan Obama masih memiliki kepentingan bersama dan kesepakatan-kesepakatan lain yang saling bertemu. Obama telah menjual senjata senilai US\$ 95 milyar ke kerajaan itu. Keduanya juga sama-sama memerangi ISIS dan al-Qaidah. Putra Mahkota Muhammad Bin Nayef selama ini terbukti merupakan partner vital bagi Amerika dalam kerja sama di bidang keamanan. Kedua negara akan merasa perlu untuk meningkatkan kerjasama memerangi AQAP yang diam-diam mengalami perkembangan secara dramatis sebagai efek tak terduga invasi koalisi Saudi dukungan AS ke Yaman (Muslim, 2016, hal. 2).

Obsesi dan ambisi Iran akan sebuah imperium “Persia Baru” telah mendorong negara Syiah itu secara agresif ikut campur tangan di banyak negara Arab. Di sini pula ada peluang kepentingan bersama antara Washington dan Riyadh untuk bekerja sama membatasi pengaruh Iran terutama di negara-negara kawasan Teluk. Ada resiko yang serius bahwa Iran akan mendukung gerakan-gerakan subversif di berbagai tempat di seluruh dunia mengingat negara itu memiliki lebih banyak income dari sumber

minyak. Selama ini, Washington telah menjadi partner yang baik di belakang Riyadh selama invasi di negara tetangganya itu. Perang ini juga telah menyedot dana milyaran dari Kerajaan.

Oleh karena itu, dampak krisis kemanusiaan juga menjadi tak terelakkan di dalam negeri Yaman dan juga di wilayah-wilayah perbatasan dengan Arab Saudi. Wakil Putra Mahkota Muhammad Bin Salman mengatakan saatnya bagi proses politik di Yaman. Muhammad Bin Salman juga menyatakan, Saudi ingin Amerika Serikat terlibat lebih banyak di kawasan itu. Yaman akan menjadi tempat untuk saling menguji coba pendekatan bersama. Memang Washington dan Riyadh punya kepentingan bersama untuk ke depannya meminimalisir pengaruh Iran di Sana, juga untuk melawan ekspansi para jihadis yang semakin kuat dan menyatu dengan rakyat di wilayah selatan di mana Washington enggan/malu mengakuinya.

Kerajaan Arab Saudi yang tengah berada dalam suatu fase perubahan generasi kepemimpinan, dan yang pertama kali sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Sebuah perubahan besar bagi negara yang menganut sistem monarki absolut. Masih ada aktifitas politik di internal keluarga kerajaan itu sejak 1963. Dan turunnya harga minyak membuat perubahan itu semakin kompleks. Kebijakan Obama dianggap sudah tepat dengan tetap membiarkan kepemimpinan klan Saudi berkuasa. Dikawasan Timur Tengah yang tengah mengalami berbagai kekacauan, negara Kerajaan Arab Saudi masih merupakan pemain utama. (Muslim, 2016, hal. 2).

#### **D. MERAJUT ULANG HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN AMERIKA SERIKAT**

Selama berpuluh-puluh tahun, Arab Saudi kerap menukar minyak mereka ke AS dengan jaminan keamanan. Akan tetapi, moto "minyak untuk keamanan" itu ternodai dengan peningkatan produksi energi Amerika Serikat secara signifikan yang juga membuat harga

minyak anjlok dan Arab Saudi didera defisit. Tak hanya perkara minyak saja yang membuat hubungan kedua negara ini menghangat. Pada masa pemerintahan Obama, pemerintah Arab Saudi pernah kecewa dengan kebijakan Amerika Serikat yang mencabut sanksi terhadap Iran atas program nuklir Teheran pada 2015. Akibat pencabutan sanksi tersebut, Arab Saudi meninjau ulang kerjasama dengan Amerika Serikat. Obama juga mengecewakan Arab Saudi saat menanggukhan penjualan senjata buatan Amerika Serikat, Raytheon Co. Penanggukan dilakukan Obama sebagai reaksi atas serangan Saudi ke Yaman yang diduga memakan korban sipil. Kehadiran Pangeran Mohammed bin Salman yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi, kemudian disebut sebagai ajang lobi menyatukan pemahaman yang sempat terganjal pada pemerintahan Obama.

Masuk ke masa pemerintahan Donald Trump, latar belakang Trump yang adalah seorang pebisnis dan minat yang kurang terhadap isu HAM serta sumpahnya untuk bersikap keras terhadap Iran menjadi faktor yang memupuk optimisme akan adanya hubungan yang lebih baik terjadi. Keduanya juga membahas perang saudara antara kelompok pemberontak Houthi (disokong Iran) dan pasukan pemerintah (didukung koalisi Saudi dan Amerika Serikat), yang tengah berkecamuk di Yaman. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga berniat memperluas aksi militernya melawan al-Qaeda di Semenanjung Arab. Apalagi, Trump mempunyai misi khusus yakni mengumpulkan dukungan negara-negara Arab Teluk untuk menyokong pembiayaan "zona aman" di Suriah sebagai alternatif penampungan pengungsi yang tidak diizinkan untuk masuk ke Amerika Serikat. Trump dan lingkaran dalam Gedung Putih juga melihat Arab Saudi sebagai komponen penting atas strategi Gedung Putih untuk mendapatkan sekutu di Timur Tengah untuk membantu memecahkan kebuntuan dalam konflik Israel-Palestina. Pendekatan seperti ini disukai oleh Jared

Kushner, menantu yang juga penasihat senior Trump. Kushner yang berasal dari keluarga Yahudi ditugaskan Trump untuk mewujudkan perdamaian Israel - Palestina. Meski begitu, pertemuan keduanya sebenarnya juga tak lepas dari upaya Arab Saudi untuk tak lagi menggantungkan ekonominya pada minyak. Sebuah reformasi ekonomi yang dengan ambisius sudah dijalankan Raja Salman dalam dua tahun pemerintahannya (Nirmala, 2017, hal. 1).

#### **E. TRUMP BAWA HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN AMERIKA SERIKAT KE LEVEL SELANJUTNYA**

Salah satu prinsip utama kampanye kepresidenan Donald Trump adalah

janjinya untuk mewujudkan "kebebasan akan ketergantungan dalam bidang energi," sebuah janji yang memenangkannya dukungan yang sangat kuat dari industri bahan bakar fosil Amerika Serikat. Setelah pemilihan tersebut, Trump tampaknya tetap berkomitmen untuk janji ini, bersumpah untuk memblokir semua impor minyak dari Arab Saudi untuk menjamin kemandirian energi domestik dari "musuh kita dan kartel minyak." Tetapi Arab Saudi, seperti sudah ditakdirkan, untuk waktu yang lama tidak ada di daftar "musuh" Trump. Pertemuan pertama Trump dengan seorang anggota keluarga kerajaan Saudi Wakil Putra Mahkota Mohammed bin Salman menandai "titik balik sejarah," tidak hanya untuk kebijakan Trump sendiri mengenai monarki Teluk, tetapi untuk hubungan Amerika Serikat-Saudi secara keseluruhan, ini menurut sebuah pernyataan dikeluarkan oleh Saudi setelah pertemuan. Pernyataan yang dikeluarkan oleh penasihat senior wakil pangeran itu, menambahkan bahwa hubungan Amerika Serikat-Saudi selama era Obama "telah mengalami periode perbedaan pendapat." Ia melanjutkan "Namun, pada pertemuan ini telah menempatkan hal-hal di jalur yang benar, dan menandai perubahan signifikan dalam hubungan secara keseluruhan semua bidang politik,

militer, keamanan dan ekonomi. Semua ini karena pemahaman yang hebat serta pandangan yang jelas Presiden Trump tentang pentingnya hubungan antara kedua negara. Setelah pertemuan bersejarah itu, kerja sama antara kedua negara tersebut akan berada di level paling atas.

Tetapi Arab Saudi memiliki beberapa keterlibatan dengan pihak asing yang bertujuan untuk memperluas pengaruhnya bersama dengan Amerika Serikat yang kecanduan minyak Saudi, hal itu menawarkan Trump kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai "teman sejati" dari orang-orang Saudi. Namun, tampaknya lebih kegiatan lobi Arab Saudi pada dasarnya adalah untuk melawan Iran (Webb, 2017, hal. 1-3).

Meskipun pandangan Amerika Serikat berubah, persaingan geopolitik lama antara Saudi Arab dan Iran adalah kunci untuk mengetahui niat sebenarnya Washington di kawasan itu, konflik Saudi di Yaman adalah peristiwa penting lainnya dalam menilai apakah Trump pada akhirnya akan menjadi "teman yang sebenarnya" seperti yang diharapkan oleh Arab Saudi. Sejak Maret 2015, Saudi telah melancarkan perang brutal di Yaman yang melibatkan genosida, namun semua itu bermaksud untuk mempertahankan pengaruh strategis geografis. Dalam upaya untuk menghilangkan resistensi terhadap pengaruh asing di Yaman, Saudi telah melakukan banyak kejahatan perang, mengakibatkan krisis kemanusiaan besar-besaran yang merenggut nyawa sekitar 1.000 anak setiap minggu.

Sementara Amerika Serikat tetap diam menyangkut kejahatan perang yang dilakukan Saudi di Yaman dan malah "membantu" Saudi dengan serangan udara dan penjualan senjata besar-besaran, pemerintahan Obama mencoba yang terbaik untuk tidak menjadi pemeran utama dalam konflik tersebut dan juga menghormati kesepakatan Amerika Serikat-Saudi selama puluhan tahun.

Tetapi di bawah Trump, keterlibatan Amerika Serikat di Yaman telah meningkat. Seperti yang dilaporkan oleh *Foreign policy*, Trump baru-baru ini menjatuhkan lebih banyak bom di Yaman dalam satu minggu daripada yang dilakukan Obama dalam satu tahun penuh. Tidak hanya itu, tetapi serangan Navy Seal di Yaman juga terjadi di bawah pengawasan Trump, sebuah serangan yang gagal dan mengakibatkan hilangnya banyak nyawa warga sipil. Peningkatan ini tampaknya menunjukkan bahwa Trump berusaha memenangkan persetujuan dari Saudi. Namun, beberapa analis berpendapat bahwa peningkatan keterlibatan Amerika Serikat di Yaman tidak mungkin melangkah lebih jauh dari yang sudah dilakukan. Gregory Gause, seorang profesor hubungan internasional spesialis Saudi di Texas A & M University mengatakan kepada Bloomberg bahwa “saya tidak berpikir bahwa pemerintahan Trump ingin terlibat lebih dalam di Irak, Suriah atau lainnya serta tempat di mana orang-orang Saudi menginginkan bantuan dalam membalikkan pengaruh Iran” (Webb, 2017, hal. 3)